

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan, cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Salah satu Kabupaten yang melaksanakan perencanaan RPJMD adalah Kab. Kep. Mentawai. perencanaan RPJMD di Kab. Kep. Mentawai memang sudah dimulai, akan tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan, seperti melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah Kab. Kep. Mentawai melaksanakan program Musrenbang. Hasil dari Musrenbang tersebut, dapat dilihat beberapa OPD yang tidak ikut terlibat, serta proses perencanaan pembangunan masih dalam posisi pendekatan politik.

Persoalan perencanaan RPJMD yang masih dalam posisi pendekatan politik terdiri dari beberapa program dan visi/misi Bupati Yudas Sabaggalet selama kampanye dan setelah terpilih, diantaranya program peningkatan SDM dan peningkatan Infrastruktur yang dijadikan sebagai kepentingan politik. Tidak hanya itu, perencanaan pembangunan pendekatan politik dalam penerapan visi/misi lebih cenderung dan didominasi oleh pendekatan *Top-Down*, karena banyaknya masyarakat yang tidak percaya dan merasa kecewa pemerintah daerah Kab. Kep. Mentawai. Program perencanaan RPJMD yang ditawarkan kesannya untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sementara fakta yang dirasakan masyarakat bukanlah demikian. Kebijakan dan komitmen maupun visi/misi dari Bupati lebih

didominasi oleh pihak-pihak yang menjadikan visi-misi tersebut sebagai kepentingan politik, pribadi maupun golongan. Dapat peneliti jelaskan dari temuan peneliti sebagai berikut:

Dalam perencanaan RPJMD, pemerintah daerah Kab. Kep. Mentawai sudah mulai melaksanakan program Musrenbang yang melibatkan berbagai *stakeholder* yaitu, Kepala dusun, Kepala desa, camat, bupati, wakil bupati, Anggota DPRD, Gubernur dan tokoh Masyarakat. Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam musrenbang adalah beberapa OPD tidak ikut mengambil bagian dalam kegiatan musrenbang.

Persoalan perencanaan RPJMD Kab. Kep. Mentawai yang masih mengarah pada pendekatan *top-down*, sebagai berikut: “Masalah tanah adat yang mau dieksekusi di Taileleu, tanah yang mau dieksekusi oleh salah satu anggota DPRD yang bernama Adisem (nama yang dikenal oleh masyarakat) ada unsur penipuan dan pembodohan masyarakat di dalamnya. Berdasarkan informasi, tanah tersebut sudah dibeli sekitar seratus hektar, padahal dari pengakuan masyarakat taileleu sebagai pemilik tanah, yang dibeli hanya sekitar sepuluh hektar saja, tetapi setelah di sidangkan perkara tanah itu di MK, justru anggota DPRD yang bersangkutan malah dimenangkan dalam sidang tersebut. Masalah ketimpangan kebijakan ini yang mengarah pada pendekatan *Top-down* membuat masyarakat enggan untuk percaya dan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan

Melihat apa yang menjadi faktor penghambat dari perencanaan RPJMD untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Dapat peneliti jelaskan dari hasil temuan peneliti sebagai berikut: Masih kurangnya sosialisasi dari Pemda Kab. Kep.

Mentawai dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur. Masyarakat tidak memahami untuk apa jalan tersebut dibangun, sehingga hal itu menambah masalah baru ketika masyarakat menuntut harus ada ganti rugi dengan alasan kebun atau tanaman yang ditebang sudah sangat merugikan mereka. Masih sering kali terjadi khususnya antar perangkat daerah, dikarenakan kurangnya pemahaman aturan pelaksanaan dalam proses perencanaan pembangunan, ada keterlambatan-keterlambatan dalam menjalankan tugas.

faktor penghambat pembangunan partisipasi dalam perencanaan RPJMD dari masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dipengaruhi juga oleh masalah rendahnya SDM. Kurangnya SDM sangat berpengaruh pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat untuk membedakan mana yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan dan mana yang hanya sekedar menjadi keinginan.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari hasil temuan peneliti di lapangan tentang perencanaan pembangunan daerah Kab. Kep. Mentawai Tahun 2012-2017 maka terdapat beberapa saran-saran dari peneliti yaitu baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

6.2.2 Saran Teoritik

1. Kajian persoalan perencanaan RPJMD sangat relevan dilaksanakan dalam pembangunan di bagian pemerintah pusat maupun bagian pemerintah daerah. Perencanaan RPJMD memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya di negara

Indonesia yang masyarakatnya merupakan masyarakat yang pluralisme, yang terdiri dari suku, bahasa, budaya, geografis dan kepentingan yang berbeda. Untuk itulah, dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pembangunan yang merata perlu dilibatkan peran di setiap *stakeholder* melalui program Musrenbang, seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kab. Kep. Mentawai dalam menampung partisipasi masyarakat, walaupun beberapa OPD tidak ikut dalam menyukseskan program musrenbang tersebut.

2. Perencanaan RPJMD justru menjadi kajian yang sangat menarik perhatian dalam penelitian ini, sejauh mana pelaksanaan perencanaan RPJMD Kab. Kep. Mentawai.

3. Untuk Penelitian lanjutan, dalam penelitian ini peneliti tidak menjelaskan alasan secara detail mengenai pengaruh perencanaan RPJMD bagi suatu Kabupaten, hanya sebatas mendeskripsikandan menganalisi persoalan perencanaan RPJMD di Kab. Kep. Mentawai

6.2.2 Saran Praktis

1. Sebagai saran bagi pihak pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan perencanaan RPJMD, hendaknya belajar bagaimana caranya melibatkan setiap *stakeholder* khususnya partisipasi dari masyarakat melalui kegiatan musrenbang serta melakukan evaluasi dengan serius dan rutin untuk melihat sejauh mana visi/misi dari kepala daerah yang terdapat dalam dokumen RPJMD memang sudah terlaksana, supaya tidak hanya fokus berada dalam posisi pendekatan politik yang pada akhirnya visi/misi tersebut dijadikan sebagai alat kepentingan politik dan cenderung serta didominasi oleh Pendekatan *Top-down*.

2. Perencanaan RPJMD juga meningkatkan relasi dan adanya saling percaya antara masyarakat maupun pemerintah. Perencanaan RPJMD yang efektif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang adil dan merata.

